

**STRATEGI PEMERINTAH DESA DALAM MENINGKATKAN  
PELAYANAN ADMINISTRASI DI DESA PENDUNG HILIR  
KECAMATAN AIR HANGAT KABUPATEN KERINCI**

ELENA LESTARI, MASNON, NURFITRI  
STIA NUSANTARA SAKTI SUNGAI PENUH

Email:

[elenalestari144@gmail.com](mailto:elenalestari144@gmail.com)

[masnonmsi@gmail.com](mailto:masnonmsi@gmail.com)

[fitrinur8833@gmail.com](mailto:fitrinur8833@gmail.com)

**Abstract**

This research uses descriptive qualitative with purposive sampling techniques as a determinant of research informant. The resultd showed that the village government's strategy in administrative services can be said to be running quite well and will further improve the existing administrative services un the downstream pendung village. The resultd showed that the improving human resources, improve village facilities, improve the work discipline of the village apparatus in the downstream village.

Keyword : *strategy, village government, public services, village administration*

**ABSTRAK**

Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif deskriptif dengan teknik purposive sampling sebagai penentu informan penelitian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa strategi pemerintah desa dalam pelayanan administrasi desa pendung hilir sudah berajalan dengan cukup baik. Hal ini terlihat dari meningkatnya sumber daya manusia, meningkatkan fasilitas desa, meningkatkan kedisiplinan kerja aparatur desa di desa pendung hilir.

*Kata kunci : Strategi, Pemerintahan Desa, Pelayanan Publik, Administrasi Desa.*

**I. PENDAHULUAN**

**Latar Belakang Masalah**

Pelayanan adalah suatu aktivitas yang bersifat tidak kasat mata tidak dapat diraba) yang telah terjadi sebagai akibat adanya interaksi antara konsumen dengan karyawan atau hal-hal lain yang dimaksudkan untuk memecahkan permasalahan konsumen atau pelanggan (Raminto dan Atik septi Winarsih:2015).

Pelayanan administrasi adalah bentuk penyediaan dokumen pelayanan publik yang dibutuhkan oleh masyarakat, minsalnya pelaynanan dalam hal pembuatan akta kelahiran, kartu tanda penduduk, sertifikat tanah, surat tanda kendaraan bermotor, surat izin mengemudi, dan izin mendirikan bangunan.

Adapun masalah dilapangan di Desa Pendung Hilir merupakan salah satu desa yang berada diwilayah kabupaten kerinci yang selalu mendapatkan masalah didalam pelayanan administrasi. hal ini dikarenakan kurangnya minat perangkat-perangkat desa dalam

pelayanan administrasi. Permasalahan atau fenomena/kesulitan yang didapatkan oleh masyarakat dalam menerima pelayanan tentang administrasi di desa pendung hilir diantaranya :

1. Kemampuan perangkat desa dalam mengoperasikan komputer untuk kegiatan surat menyurat masih kurang minim.
2. Kurangnya sarana dan prasarana dalam rangka menjalankan tugas perangkat desa.
3. Kurangnya disiplinnya perangkat desa dalam menjalankan tugas, dimana sering terlambat masuk dan pulang cepat.
4. Tidak adanya pelatihan dalam hal administrasi khususnya mengoperasikan komputer.

Berdasarkan uraian diatas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul: **“STRATEGI PEMERINTAH DESA DALAM MENINGKATKAN PELAYANAN ADMINISTRASI DI DESA PENDUNG HILIR KECAMATAN AIR HANGAT KABUPATEN KERINCI”**.

### **Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian identifikasi masalah diatas dapat disimpulkan yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu :

1. Bagaimanakah strategi pemerintah desa pendung hilir dalam meningkatkan pelayanan administrasi di desa pendung hilir kecamatan air hangat kabupaten kerinci ?
2. Apa saja faktor-faktor penghambat pemerintah desa dalam meningkatkan pelayanan administrasi di desa pendung hilir ?

### **Tujuan Penelitian**

1. Ingin mengetahui bagaimana strategi pemerintah desa dalam meningkatkan pelayanan administrasi di desa pendung hilir kecamatan air hangat kabupaten kerinci.
2. Ingin mengetahui apa saja faktor-faktor penghambat pemerintah desa dalam meningkatkan pelayanan administrasi di desa pendung hilir.

## **II. TINJAUAN PUSTAKA**

### **Pengertian Strategi**

Istilah strategi berasal dari bahasa Yunani *Strategia (startos=militer dan ag=memimpin)*, yang artinya seni atau ilmu untuk menjadi seorang jenderal. Strategi bisa diartikan sebagai suatu rencana untuk pembagian dan penggunaan kekuatan militer pada daerah-daerah tertentu untuk mencapai tujuan tindakan tertentu.

Strategi adalah proses penentuan rencana para pemimpin puncak yang berfokus pada tujuan jangka panjang organisasi, disertai penyusunan suatu cara atau upaya bagaimana agar tujuan tersebut dicapai. Strategi merupakan tindakan yang bersifat *incremental* (senantiasa meningkat) dan terus-menerus, serta dilakukan berdasarkan sudut pandang tentang apa yang diharapkan oleh para pelanggan dimasa depan. Dengan demikian, strategi hampir selalu dimulai dari apa yang dapat terjadi dan bukan dimulai dari apa yang terjadi. Terjadinya kecepatan inovasi pasar yang baru dan perubahan pola konsumen memerlukan kompetensi inti (*core competencies*). Perusahann mencari kompetensi inti di dalam bisnis yang dilakukan (Setiawan Dimas,2016).

### **Bentuk-Bentuk Strategi**

Para penulis telah mengelompokkan strategi kedalam beberapa bentuk. Strategi pada dasarnya dapat dikelompokkan dalam bentuk-bentuk sebagai berikut:

- a. Strategi manajemen

Strategi manajemen adalah serangkaian keputusan dan tindakan mendasar bikinan manajemen tertinggi yang diaplikasikan oleh semua anggota organisasi demi terwujudnya organisasi.

b. Strategi investasi

Strategi investasi adalah rangkaian cara-cara yang dilakukan investor untuk meraih keuntungan maksimal, serta mengurangi risiko.

c. Strategi bisnis

Strategi bisnis adalah upaya perusahaan dalam mengambil kebijakan dan pedoman yang memiliki komitmen dan tindakan yang terintegrasi serta dirancang untuk membangun keunggulan dalam persaingan bisnis untuk memenuhi dan mencapai tujuan bisnis.

### **Pelayanan Administrasi**

Pelayanan merupakan bagian dari administrasi oleh karena itu, untuk lebih jelasnya akan diuraikan dalam sebuah teori-teori dan salah satu aspek yang penting dalam melaksanakan fungsi pemerintahan adalah melayani masyarakat dan berbagai aktivitasnya yang bersangkutan dengan pemerintah, untuk itulah pemerintah membentuk sistem administrasi dan birokrasi mulai dari pemerintahan yang terendah. hal tersebut dimaksudkan agar dapat memberikan pelayanan yang lebih optimal bagi seluruh masyarakat dan fungsinya sebagai pelayanan masyarakat (Undang-Undang No.32 Tahun 2004).

Pelayanan mempunyai dua istilah penting yang perlu diketahui yaitu melayani adalah membantu menyiapkan apa yang diperlukan seseorang, sedangkan pelayanan adalah usaha melayani kebutuhan orang lain (Poerwadarminta, 1995:572).

Menurut Ubert (dalam Umar Husein 2004:2) definisi administrasi dapat dilihat dari dalam pengertian sempit dan luas. Administrasi secara sempit didefinisikan sebagai penyusunan dan pencatatan data dan informan secara otomatis baik internal maupun eksternal dengan maksud menyediakan keterangan serta memudahkan untuk memperoleh kembali baik sebagian maupun menyeluruh. sedangkan administrasi secara luas mempunyai arti sebagai suatu kerja sama yang dilakukan oleh sekelompok orang dan organisasi berdasarkan pembagian kerja sebagaimana ditentukan dengan struktur serta mendayagunakan sumber daya untuk mencapai tujuan efektif dan efisien.

### **Tujuan Pelayanan Publik**

Tujuan pelayanan publik adalah memberikan pelayanan yang dapat memenuhi dan memuaskan pelanggan atau masyarakat serta memberikan fokus pelayanan kepada pelanggan, pelayanan sektor publik tidaklah mencari untung tetapi memberikan pelayanan sesuai dengan kebutuhan masyarakat secara sangat baik atau terbaik.

### **Konsep Pelayanan Publik**

Konsep pelayanan publik adalah suatu proses pemenuhan kebutuhan yang diberikan oleh pihak lain yang memiliki hak atau kemampuan untuk memenuhi kebutuhan tersebut. pelayanan masyarakat adalah sikap menolong, bersahabat dan profesional yang memuaskan masyarakat dan menyebabkan masyarakat datang kembali untuk mohon pelayanan kembali.

Secara umum pelayanan kepada masyarakat pada hakikatnya dapat diartikan dengan urusan administrasi, pembangunan yang bertujuan mempermudah aktivitas masyarakat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa dan pelayanan administrasi yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik

berdasarkan kepentingan umum, kepastian hukum, kesamaan, kewajiban, profesional, partisipatif, persamaan perlakuan atau tidak diskriminatif, keterbukaan akuntabilitas, fasilitas dan perlakuan khusus bagi kelompok, ketepatan waktu, kecepatan, kemudahan dan kejangkauan.

### **Kualitas Pelayanan Publik**

Secara teroriats pelayanan publik pada dasarnya adalah untuk memuaskan masyarakat. Untuk mencapai kepuasan itu dituntut kualitas pelayanan prima bercermin dari:

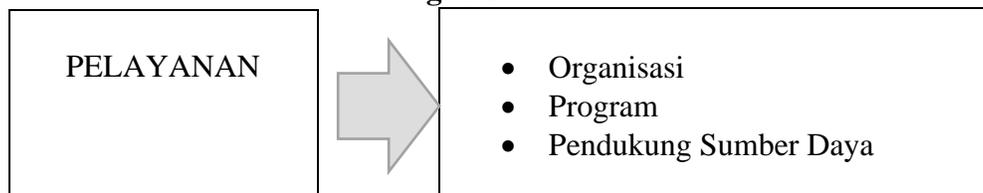
- a. Transfaransi yaitu pelayanan yang bersifat terbuka, mudah dan dapat diakses oleh semua pihak yang membutuhkan.
- b. Akuntabilitas yaitu pelayanan yang dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- c. Kondisional yaitu pelayanan yang sesuai dengan kondisi kemampuan penerima pelayanan dengan tetap berpegang pada prinsip efisien dan efektivitas.
- d. Partisifasif yaitu pelayanan yang mendorong peran serta masyarakat dalam penyelenggara pelayanan publik dengan memperhatikan aspirasi kebutuhan dan harapan masyarakat.
- e. Kesamaan baik yaitu pelayanan yang tidak melakukan diskriminasi dilihat dari aspek apapun khususnya suku, agama, golongan, dan status sosial.

### **Kerangka Berpikir**

Pada penelitian ini peneliti melakukan penelitian menggunakan Teori Wibisono (2006) pada strategi pemerintah desa dalam meningkatkan pelayanan administrasi, Ada 3 variabel Dalam strategi yaitu:

1. *Corpate Strategy* (Strategi Organisasi)  
Strategi ini berkaitan dengan perumusan visi, misi, tujuan, nilai-nilai dan insiatif-insiatif strategi yang baru dan Batasan-batasan yang diperlukan, yaitu apa yang dilakukan dan untuk siapa.
2. *Program strategy* (Strategi Program)  
Strategi ini lebih memberi perhatian pada implikasi-implikasi startegi dari suatu program tertentu. bagaimana dampaknya atau respon apabila suatu program tertentu dilancarkan atau diperkenalkan dan apa dampaknya terhadap organisasi.
3. *Resource Support Strategy* (Strategi Pendukung Sumber Daya)  
Strategi sumber daya lebih difokuskan terhadap bagaimana memaksimalkan pemanfaatan sumber daya secara ersedia guna meningkatkan kualitas organisasi. sumber daya itu juga dapat berupa tenaga, teknologi, dan keuangan.

**Tabel2.4.1**  
**Kerangka berfikir**



Sumber: Wibisono (2006)

### III. METODE PENELITIAN

#### Pendekatan Penelitian

Pendekatan ini bersifat kualitatif dengan menggunakan Metode Deskriptif. Sehingga penulis ini akan mendeskripsikan bagaimana Strategi Pemerintah Desa Dalam Meningkatkan Pelayanan Administrasi di Desa Pendung Hilir Kecamatan Air Hangat Kabupaten Kerinci, hambatan yang ditemui dalam meningkatkan pelayanan administrasi dan upaya dalam meningkatkan kinerja aparatur desa pendung hilir. Penelitian kualitatif menggunakan metode kualitatif yaitu pengamatan, wawancara, atau penelaahan dokumen.

Menurut Sugiyono (2019:18), metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat *postpositivisme*, digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah, (sebagai lawannya adalah eksperimen) dimana peneliti ini sebagai instrument kunci, rekbik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi (gabungan), analisis dan bersifat induktif/kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari pada generalisasi.

#### DESKRIPSI HASIL PENELITIAN

#### Strategi Pemerintah desa dalam meningkatkan pelayanan administrasi di Desa Pendung hilir, Kecamatan Air Hangat, kabupaten kerinci

Dalam beberapa penerapan administrasi pemerintahan desa, tentunya terdapat kendala-kendala yang menghambat seperti yang telah diuraikan diatas. Hal ini tentu perlu di evaluasi untuk mencari solusi agar pelayanan administrasi pemerintahan desa dapat berjalan dengan baik sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia nomor 47 Tahun 2016 pada bagian ini, penulis akan menguraikan beberapa upaya Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pelayanan Administrasi di Desa Pendung Hilir, diantaranya adalah:

#### Corpate Strategy

##### 1. Meningkatkan Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia memegang peran penting dalam proses keberhasilan suatu desa. Kualitas sumber daya manusia tentunya akan membawa suatu proses perubahan bagi desa. Sumber daya manusia yang berkualitas sangat dibutuhkan dalam mewujudkan tertib administrasi desa.

Selain itu, kontribusi sumber daya manusia juga sangat berpengaruh terhadap peningkatan administrasi pemerintah desa. Namun, kualitas sumber daya manusia di desa Pendung hilir ini masih dalam kategori rendah, sehingga ketertiban pemerintahan desa Pendung Hilir belum sesuai dengan Peraturan Menteri dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 47 tahun 2016. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi rendahnya sumber daya manusia di desa Pendung hilir ini seperti Pendidikan, jumlah penduduk, serta ekonomi. Sebagaimana yang telah disampaikan oleh **Bapak Putra Yadi S.Pd selaku sekretaris desa Pendung hilir** mengatakan:

*“Memang di desa Pendung Hilir ini masih rendah kualitas sumber daya manusianya, sehingga perlu untuk untuk meningkatkan sumber daya manusia tersebut. Nah, salah satu upaya kami dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia adalah Pendidikan, terutama untuk aparatur pemerintahan desa agar dapat menjalankan atau mewujudkan tertib administrasi agar kedepan proses administrasi di desa kita ini dapat lebih baik” (wawancara, Sabtu 01 Januari 2022 jam 10:00).*

Selanjutnya, **Bapak Danus selaku Kasi Pelayanan desa Pendung hilir** menjelaskan:

*“Upaya yang pertama kami lakukan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia adalah mengikuti pelatihan dan sosialisasi agar administrasi desa Pendung hilir dapat tertib dan juga bisa mensejahterakan masyarakat desa Pendung hilir sehingga juga berdampak kepada kemajuan desa” (wawancara, Sabtu 01 januari 2022 jam 10:50).*

Berdasarkan uraian diatas, dapat disimpulkan bahwa di desa Pendung hilir Kecamatan Air hangat Kabupaten Kerinci memang memiliki kualitas sumber daya manusia yang masih rendah, sehingga salah satu upaya dalam menerapkan administrasi desa yaitu dengan cara meningkatkan kualitas sumber daya manusianya. Masyarakat desa Pendung hilir saat ini sedang berupaya meningkatkan Pendidikan serta mengikuti pelatihan dan mengadakan sosialisasi guna terwujudnya tertib administrasi desa yang telah dijelaskan dalam permendagri nomor 47 tahun 2916 tentang administrasi pemerintahan desa.

### **Program Strategy**

#### **2. Meningkatkan Fasilitas Desa**

Salah satu aspek yang seharusnya diperhatikan dalam mewujudkan sistem pemerintahan yang baik yaitu fasilitas. Karena jika fasilitas tidak memadai maka kelancaran dalam penerapan administrasi yang baik itu menjadi terhambat. Fasilitas merupakan sarana dan prasarana atau alat penunjang keberhasilan suatu proses atau upaya yang dilakukan dalam pelayanan publik, karena apabila fasilitas tidak tersedia atau tidak memadai maka semua kegiatan yang dilakukan tidak akan mencapai hasil yang sesuai dengan rencana.

Sebagaimana yang disampaikan **Bapak Tibar Tono S.E selaku kepala desa Pendung hilir** mengatakan:

*“Ya kalau di desa kita ini perlu ada peningkatan fasilitas desa karena juga dapat berpengaruh terhadap penerapan administrasi desa, selama ini fasilitas kita sangat tidak memadai dan juga kadang tidak bisa digunakan. Kedepan kita berusaha untuk meningkatkan lagi fasilitas guna untuk menertibkan adminstrasi di desa Pendung hilir” (wawancara Rabu 03 janauri 2022 jam 09:10).*

Selanjutnya **Bapak Danus selaku kaur pelayanan desa Pendung hilir** memberi pendapat:

*“Selama ini desa kita ini memang fasilitas tidak memadai, harapan kami sebagai aparat desa akan mempergunakan dana-dana desa dengan baik, agar digunakan untuk menambah atau membeli alat komputer dan alat yang berhubungan dengan administrasi desa, dan akan memberi pelayanan administarsi desa dengan sebaik baik nya untuk masyarakat yang ada di desa pendung hilir” (wawancara, Rabu 03 Januari 2022 jam 09:50).*

Dari hasil wawancara penulis diatas, diketahui bahwa fasilitas yang ada di desa Pendung hilir ini kurang dan tidak memadai, hal ini berpengaruh terhadap penerapan administrasi desa dan pelayanan publik, sehingga aparat desa dan masyarakat mengupaya untuk meningkatkan fasilitas desa, agar tugas-tugas desa dapat diselesaikan secara efektif dan efesien sehingga tidak lagi kendala dalam sistem administrasi.

### **Resource Support Strategy**

#### **3. Meningkatkan Disiplin Kerja Aparatur Desa**

Selain meningkatkan sumber daya manusia fasilitas, upaya yang dilakukan oleh pemerintahan desa Pendung hilir dalam meningkatkan pelayanan administrasi adalah dengan

meningkatkan disiplin kerja dari aparatur pemerintahan desa itu sendiri. Hal ini dilakukan, demi mewujudkan aparatur pemerintahan desa yang patuh terhadap aturan yang berlaku dalam melaksanakan tugasnya sehari-hari, agar senantiasa aturan-aturan tersebut sepenuhnya akan diterapkan dan dapat meningkatkan kinerja aparatur pemerintahan desa Pendung hilir.

Menurut **Bapak Egi Fernando S.Pd selaku kaur umum desa Pendung hilir** mengatakan:

*“Kedisiplinan para aparatur desa sangat mempengaruhi terhadap sistem administrasi desa, jadi untuk kedepan kepala desa harus selalu menekankan kepada aparatur desa agar meningkatkan kedisiplinan, patuh dan taat kepada peraturan dan tanggung jawab dengan jabatanyang dibebankan agar tewujudnya administrasi yang tertib yang sebagaimana yang telah dijelaskan oleh peraturan perundang-undangan” (wawancara Rabu 05 Januari 2022 jam 09:30).*

Selanjutnya **Bapak Tibar Tono S.E sebagai kepala desa Pendung hilir** mengatakan:

*“Salah satu upaya yang harus dilakukan adalah menerapkan kedisiplinan kerja pada aparatur pemerintahan desa, patuh dan taat kepada peraturan serta tanggung jawab pada jabatan, dan saya selaku kepala desa sangat berharap dengan peningkatan kedisiplinan kerja aparatur pemerintahan desa dapat mewujudkan administrasi yang tertib, dan tidak ada lagi kendala dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat” (wawancara Rabu 05 Januari 2022 jam 10:10).*

Berdasarkan hasil wawancara diatas dicermati bahwa di desa Pendung hilir Kecamatan air hangat saat ini memang sangat diperhatikan masalah desa kedisiplinan dari aparatur pemerintahan desa ketika melakukan tugas-tugasnya hal ini ditujukan bahwa dengan meningkatkan kedisiplinan kerja aparatur pemerintahan desa Pendung hilir salah satu upaya yang dilakukan oleh pemerintah desa Pendung hilir untuk bisa memenuhi serta melaksanakan seluruh peraturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah, agar nantinya bisa meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Berdasarkan penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa upaya yang harus dilakukan oleh pemerintah desa Pendung hilir dalam meningkatkan Pelayanan Administrasi yaitu pertama meningkatkan sumber daya manusia. Kedua meningkatkan fasilitas desa yang ketiga meningkatkan kedisiplinan kerja dari pada aparatur pemerintah desa Pendung hilir.

#### **4.3 Faktor-faktor Kendala Pemerintahan Desa Dalam Meningkatkan Pelayanan Administrasi Di Desa Pendung Hilir Kecamatan Air Hangat Kabupaten Kerinci**

Dalam penerapan untuk meningkatkan pelayanan administrasi di desa Pendung hilir, pemerintah desa Hingga saat ini masih menghadapi sejumlah tantangan dan kendala, karena untuk menerapkan semua peraturan yang ada bukanlah suatu hal yang mudah. Tentunya untuk menetapkan semua peraturan yang ada dibutuhkan usaha, perjuangan serta waktu. Dalam penelitian ini, penulis menemukan beberapa kendala Pemerintahan Desa dalam Meningkatkan Pelayanan Administrasi di Desa Pendung Hilir, seperti:

#### **Upaya pemerintah desa dalam memberi pelayanan administrasi kepada masyarakat desa pendung hilir**

Administrasi pemerintahan memegang peranan penting karena keterlibatan pemerintah yang besar pada proses pembangunan dalam sistem administrasi. Untuk itu agar tujuan pembangunan benar-benar dapat tercapai seperti yang diharapkan, maka yang baru harus diperhatikan adalah adanya aparat pemerintah yang memiliki kualitas yang memadai. Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2016 tentang administrasi pemerintahan desa telah dijelaskan proses dan tata aturan penataan administrasi yang ada di desa yang meliputi Administrasi umum, administrasi Kependudukan.

Administrasi keuangan, administrasi pembangunan, administrasi permusyawaratan desa. Pelaksanaan administrasi desa adalah sebagai wujud pemerintah pusat dalam mewujudkan pemerintahan yang baik dan tepat sasaran, untuk menyelenggarakan administrasi desa yang efektif. Menanggapi bagaimana Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 47 tahun 2016 tentang administrasi pemerintahan desa di desa Pendung Hilir Kecamatan Air Hangat Kabupaten Kerinci, sebenarnya sebagian sudah diterapkan, namun ada beberapa kendala serta kekurangan dalam mengoptimalkan administrasi desa.

Seperti yang dijelaskan oleh bapak **Putra Yadi S.Pd selaku sekretaris desa Pendung Hilir:** *“Selama ini dalam menjalankan administrasi desa baik masih banyak kekurangan. Disebabkan oleh banyak perangkat desa yang tidak mengerti tentang administrasi mungkin karena banyak anggota baru di dalam staf desa dan dalam segi pelayanan kepada masyarakat saya selaku sekdes atau mewakili aparat pemerintah desa yang hanya memberikan pelayanan seadanya saja atau sebisa saya.”* (wawancara, Selasa, 11 Januari 2022, jam 11:30).

Berdasarkan beberapa pendapat diatas, dapat disimpulkan bahwa di desa Pendung Hilir ini memang belum menjalankan Pelayanan Administrasi desa dengan baik sesuai dengan Peraturan Menteri dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2016 tentang administrasi pemerintahan desa. Pada tahap pelaksanaan pelayanan administrasi desa di desa Pendung hilir ini masih banyak sekali yang belum sesuai dengan peraturan yang ditentukan, yang sesuai dengan Peraturan Menteri dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2016, hal ini disebabkan oleh terbatasnya pengetahuan aparat desa tentang administrasi desa, sehingga perencanaan, pengawasan, dan evaluasi untuk mencapai tujuan yang akan dilaksanakan menjadi terhambat, selama ini aparat desa hanya melakukan tugas-tugas yang mereka ketahui saja jika mereka tidak mengetahui mereka tidak membuatnya, memberi pelayanan yang seadanya kepada masyarakat. seharusnya, kegiatan-kegiatan administrasi pemerintahan desa harus di dukung dengan pengorganisasian yang matang dan pengetahuan yang luas mengenai administrasi agar tidak terjadi kesalahan dalam menerapkan administrasi yang baik.

Di samping itu, kurangnya sumber daya manusia di desa Pendung Hilir juga merupakan faktor penghambat Pemerintahan Desa Dalam Meningkatkan Pelayanan Administrasi, karena administrasi Pemerintahan Desa dapat berjalan dengan baik, apabila sumber daya manusianya cukup serta kualitas sumber daya manusia yang melaksanakan dan menerapkan administrasi desa handal dan memiliki kemampuan dalam menjalankan tugas yang diberikan. Kapasitas serta kapabilitas dari para pelaku yang mengelola administrasi desa dapat menentukan kemajuan dari suatu desa, karena implementasi bukan sekedar aktivitas tetapi suatu kegiatan yang terencana dan untuk mencapai tujuan kegiatan. Dalam hal ini, desa Pendung Hilir dapat dikatakan belum melaksanakan administrasi desa dengan baik sesuai peraturan yang berlaku.

**Upaya pemerintah desa dalam memberi pelayanan administrasi kepada masyarakat desa pendung hilir**

Administrasi pemerintahan memegang peranan penting karena keterlibatan pemerintah yang besar pada proses pembangunan dalam sistem administrasi. Untuk itu agar tujuan pembangunan benar-benar dapat tercapai seperti yang diharapkan, maka yang baru harus diperhatikan adalah adanya aparat pemerintah yang memiliki kualitas yang memadai. Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2016 tentang administrasi pemerintahan desa telah dijelaskan proses dan tata aturan penataan administrasi yang ada di desa yang meliputi Administrasi umum, administrasi Kependudukan.

Administrasi keuangan, administrasi pembangunan, administrasi permusyawaratan desa. Pelaksanaan administrasi desa adalah sebagai wujud pemerintah pusat dalam mewujudkan pemerintahan yang baik dan tepat sasaran, untuk menyelenggarakan administrasi desa yang efektif. Menanggapi bagaimana Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 47 tahun 2016 tentang administrasi pemerintahan desa di desa Pendung Hilir Kecamatan Air Hangat Kabupaten Kerinci, sebenarnya sebagian sudah diterapkan, namun ada beberapa kendala serta kekurangan dalam mengoptimalkan administrasi desa.

Berdasarkan beberapa pendapat diatas, dapat disimpulkan bahwa di desa Pendung Hilir ini memang belum menjalankan Pelayanan Administrasi desa dengan baik sesuai dengan Peraturan Menteri dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2016 tentang administrasi pemerintahan desa. Pada tahap pelaksanaa pelayanan administrasi desa di desa Pendung hilir ini amsih banyak sekali yang belum sesuai dengan peraturan yang ditentukan, yang sesuai dengan Peraturan Menteri dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2016, hal ini disebabkan oleh terbatasnya pengetahuan aparatur desa tentang administrasi desa, sehingga perencanaan, pengawasan, dan evaluasi untuk mencapai tujuan yang akan dilaksanakan menjadi terhambat, selama ini aparatur desa hanya melakukan tugas-tugas yang mereka ketahui saja jika mereka tidak mengetahui mereka tidak membuatnya, memberi pelayanan yang seadanya kepada masyarakat. seharusnya, kegiatan-kegiatan administrasi pemerintahan desa harus di dukung dengan pengorganisasian yang matang dan pengetahuan yang luas mengenai administrasi agar tidak terjadi kesalahan dalam menerapkan administrasi yang baik. Di samping itu, kurangnya sumber daya manusia di desa Pendung Hilir juga merupakan faktor penghambat Pemerintahan Desa Dalam Meningkatkan Pelayanan Administrasi, karena administrasi Pemerintahan Desa dapat berjalan dengan baik, apabila sumber daya manusianya cukup serta kualitas sumber daya manusia yang melaksanakan dan menerapkan administrasi desa handal dan memiliki kemampuan dalam menjalankan tugas yang diberikan. Kapasitas serta kapabilitas dari para pelaku yang mengelola administrasi desa dapat menentukan kemajuan dari suatu desa, karena implementasi bukan sekedar aktivitas tetapi suatu kegiatan yang terencana dan untuk mencapai tujuan kegiatan. Dalam hal ini, desa Pendung Hilir dapat dikatakan belum melaksanakan administrasi desa dengan baik sesuai peraturan yang berlaku.

## V KESIMPULAN DAN SARAN

### Kesimpulan

Berdasarkan Hasil Penelitian dan Pembahasan Tentang Strategi Pemerintah Desa Dalam Meningkatkan Pelayanan Administrasi di Desa Pendung Hiir kecamatan Air Hangat Kabupaten Kerinci. Dapat disimpulkan bahwa:

1. Dalam penyelenggaraan pelayanan administrasi di desa pendung hilir kecamatan air hangat kabupaten kerinci menurut peraturan Menteri dalam negeri nomor 47 tahun 2016 tentang administrasi pemerintah desa masih belum diselenggarakan dengan baik oleh aparatur pemerintah desa, hal ini disebabkan oleh terbatasnya pengetahuan aparatur desa tentang administrasi desa, sehingga perencanaan, pengawasan, evaluasi untuk mencapai tujuan yang akan dilaksanakan menjadi terhambat.
2. Kurangnya sumber daya manusia dari pada aparatur pemerintah desa pendung hilir, hal ini dibuktikan tidak mempunya aparatur pemerintahan desa dalam mengupayakan agar pemerintahan desa pendung hilir dapat tertib administrasinya.
3. a. meningkatkan sumber daya manusia  
b. meningkatkan fasilitas desa

c. meningkatkan kedisiplinan kerja aparatur desa

### Saran

Berdasarkan hasil penelitian maka saran yang dapat disajikan oleh peneliti adalah sebagai berikut:

1. Kepada kepala desa beserta aparatur desa, diharapkan lebih meningkatkan pelayanan demi memenuhi kepentingan serta kebutuhan masyarakat di desa Pendung Hilir, terlebih mengenai administrasi pemerintahan desa.
2. Hendaknya penyelenggara tertib administrasi di desa Pendung Hilir kedepannya lebih baik dan sesuai dengan Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 47 tahun 2016 tentang administrasi pemerintahan desa, sehingga mampu menciptakan desa yang tertib administrasi.
3. Kepala aparatur pemerintahan desa perhatikan fasilitas di desa, apabila itu tidak ada maka aparatur desa harus kreatif atau harus ada inisiatif untuk mencari jalan keluar agar bisa mendapatkan dana dari swadaya masyarakat atau APBD yang pasti untuk membeli fasilitas yang diperlukan untuk pelayanan kepada masyarakat, supaya dapat mengatasi kendala-kendala yang terdapat di desa Pendung Hilir dalam meningkatkan Pelayanan Administrasi sesuai dengan Permendagri RI Nomor 47 Tahun 2016 tentang administrasi pemerintahan desa di desa Pendung Hilir. Sehingga kegiatan administrasi tidak terbengkalai dan tertunda

## V. DAFTAR PUSTAKA

- Adi sutopo, 2006. *Pelayanan prima*. Lembaga Admnistrasi Negara.
- Amin Hadi,Haryono, 1998. *Metode Penelitian Pendidikan*, Bandung : Pustaka Setia
- Hanif Nurcholis, 2005. *Teori Praktik Pemerintah dan Otonomi Daerah*, OT GrasindoJakarta
- Iskandar, 2008. *Metodologi Penelitian Pendidikan dan Sosial Kuantitatif dan Kualitatif* . Jakarta  
GP Press
- Iskandar, 2008. *Metode Penelitian Dan Sosial Kuantitatif Dan Kualitatif* , Jakarta: GP Press
- Joko Widodo, 2007. *Analisis Kebijakan Publik*, Malang : Bayu Media Publishing
- JokoWidodo, 2001. *Etika Birokrasi Dalam Pelayanan Publik*. CV.Mitra Malang
- Lijan Poltak Sinabela, 2006. *Reformasi Prlayanan Publik*. PT.Bumi Aksara.
- Marbun B,N. 2008. *Proses Pembangunan Desa*, Jakarta : Erlangga
- Mardalis, 2010. *Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal*, Jakarta : Bumi Aksar
- Nana Syadiah Sukma Dinata,2002. *Metode Penelitian Pendidikan*, Bandung : Remaja Rosda Karya
- Nasution,2012. *Metode Research Penelitian Ilmiah* , Jakarta: Bumi Aksara
- Pebi Julianto. 2021. Menciptakan Smart ASN menuju 4.0 di Kantor Camat Kecamatan Sitingjau Laut Kabupaten Kerinci. E Jurnal Administrasi Nusantara. Sungai Penuh
- Richard Me Ginn, 2007. *Cerite-Cerite Ejang Abes*, MUrsi Rawas : Pemkas Musi Rawas
- Subarsono, 2008. *Analisis Kebijakan Publik*, Yogyakarta : Pustaka Belajar
- Sugiyono, 2010. *Metode Penelitian Pendidikan kuantitatif,kualitatif dan R&D*, Bandung Alfabeta
- Suharsimi Arikunto, 1998. *Prosedur Penelitian*, Jakarta: RinekaCipta
- TahlizuduhuNdraha, 1991. *Dimensi-Dimensi Pemerintah Desa*, Jakarta : Bumi Aksara